



Peran Hukum Dagang Dalam Transaksi Komersial Modern

Mhd Fikri Muzaki¹, Naufal Nabil², Annisa Dwi Putri Barus³, Ahmad Bukhori Nasution⁴, M. Fauzan Azizi Sipahutar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: mzkfkr@gmail.com, nabilnaufal055@gmail.com, nisabarus3030@gmail.com,
ahmadbuchori2010@gmail.com, fauzanazizi192@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received: 2025-05-07 Revised: 2025-05-15 Published: 2025-05-28	Dalam dunia bisnis modern, hukum dagang memainkan peranan yang sangat krusial. Hukum dagang tidak hanya mengatur transaksi, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang mendukung relasi bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan adanya hukum dagang, pelaku bisnis dapat menjalankan aktivitas mereka dengan kepastian hukum, mengurangi risiko sengketa, dan membangun hubungan yang lebih harmonis dengan mitra bisnis. Keteraturan ini penting dalam menjaga kestabilan pasar dan kepercayaan publik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum dagang dalam mengatur, melindungi, dan mendorong kegiatan ekonomi yang berkembang pesat di era digital dan globalisasi. Tinjauan ini mencakup aspek pengaturan hukum terkait kontrak dagang, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa, dan adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi seperti <i>e-commerce</i> dan <i>fintech</i> . Melalui pendekatan normatif dan analisis yuridis, penelitian ini menemukan bahwa hukum dagang berfungsi sebagai instrumen yang memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi komersial. Selain itu, fleksibilitas hukum dagang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan dinamika bisnis dan teknologi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan pasar global dan peningkatan literasi hukum bagi pelaku bisnis. Dengan demikian, hukum dagang dapat terus berperan sebagai landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di era modern.
Kata kunci: <i>hukum dagang, transaksi komersial, e-commerce, fintech, kepastian hukum.</i>	

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi telah membawa transformasi besar dalam transaksi komersial modern. Di era digital ini, pola perdagangan tidak lagi terbatas pada interaksi fisik, tetapi telah beralih ke ranah elektronik, seperti *e-commerce*, *platform fintech*, dan transaksi lintas negara. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam regulasi hukum, termasuk perlunya adaptasi hukum dagang agar mampu mengakomodasi dinamika baru yang timbul dari perubahan tersebut.

Hukum dagang berfungsi sebagai landasan bagi pengaturan aktivitas ekonomi, memastikan terciptanya keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, hukum dagang

memiliki peran strategis dalam mengatur hubungan antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Regulasi yang jelas dan adaptif sangat diperlukan untuk mengantisipasi risiko hukum, seperti sengketa kontrak, pelanggaran hak konsumen, dan praktik bisnis tidak etis, yang sering kali muncul dalam transaksi modern.

Namun, dengan munculnya inovasi teknologi seperti pembayaran digital, kontrak pintar (*smart contracts*), dan penggunaan blockchain, sistem hukum tradisional sering kali dianggap kurang responsif dalam menghadapi kebutuhan pasar yang cepat berubah. Hal ini menimbulkan urgensi untuk melakukan kajian mendalam mengenai peran hukum dagang dalam konteks modern guna memastikan regulasi tetap relevan, efektif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dagang dalam transaksi komersial modern dengan fokus pada regulasi kontrak, perlindungan konsumen, serta adaptasi terhadap teknologi baru. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi untuk pembaruan regulasi dan peningkatan pemahaman hukum bagi para pemangku kepentingan, sehingga hukum dagang tetap menjadi fondasi yang kokoh bagi ekosistem ekonomi modern.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis aturan-aturan hukum yang berlaku terkait hukum dagang dalam transaksi komersial modern. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang ada, menilai relevansinya dalam konteks perkembangan teknologi dan globalisasi, serta mengidentifikasi kebutuhan pembaruan regulasi.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan mengkaji sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait hukum dagang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan regulasi terkait e-commerce serta fintech. Sementara itu, sumber hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia, sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, saat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan meskipun pernah menghadapi tantangan berupa krisis ekonomi yang lama. Kemajuan yang diraih oleh Indonesia di berbagai aspek kehidupan bukanlah hasil yang didapatkan dengan instan; sebaliknya, itu adalah hasil dari upaya keras dan kolaborasi antar berbagai elemen masyarakat yang berkelanjutan. Pembangunan yang tengah dijalani guna memajukan Indonesia mencakup aspek-aspek pembangunan yang komprehensif dan holistik.

Pembangunan di bidang ekonomi dianggap sebagai motor penggerak utama dari pembangunan nasional. Meski begitu, kemajuan dalam sektor ekonomi harus dilakukan dengan mempertimbangkan integrasi dan sinergi dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Bisnis, sebagai salah satu aspek dalam ekonomi, adalah aktivitas yang dilakukan secara rutin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Melalui bisnis, individu dan komunitas berkolaborasi untuk mencapai tujuan utama, yaitu mendapatkan keuntungan atau laba. Dengan kesuksesan di bidang ekonomi, seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, kesuksesan di dunia bisnis dapat dianggap sebagai indikator kesuksesan ekonomi seseorang. Istilah "bisnis" sendiri berasal dari kata "*Business*" dalam bahasa Inggris yang mengacu pada kegiatan usaha (Rasyidi, 2018).

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa bisnis tidak hanya terbatas pada aspek perdagangan saja, tetapi juga mencakup elemen-elemen yang lebih luas dan komprehensif.

Ketika kita membahas tentang hukum, kita menyadari bahwa hukum diciptakan untuk memastikan keadilan dan kepastian bagi semua individu. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketenangan dan membantu masyarakat mencapai tujuan dan aspirasinya. Fungsi utama hukum adalah menjaga kesejahteraan dan eksistensi individu di tengah komunitas. Dalam konteks ekonomi, kesehatan sistem ekonomi seringkali erat kaitannya dengan kesehatan sistem perdagangan. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan kumpulan aturan yang jelas dan dapat diterapkan agar sistem perdagangan berjalan dengan baik dan adil.

Menurut Purwosutjipto, hukum dagang didefinisikan sebagai hukum perikatan yang khusus berlaku dalam lingkup perusahaan (Purwosutjipto, 1991). Sementara itu, R. Soekardono melihat hukum dagang sebagai bagian integral dari hukum perdata, terutama yang berhubungan dengan perjanjian dan perikatan seperti yang dituangkan dalam Buku III Burgerlijke Wetboek (BW). Ia percaya bahwa

hukum dagang adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan individu dalam bisnis, terutama yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Hukum Perdata. Selain itu, hukum ini merinci prinsip-prinsip yang menjadi landasan kegiatan perdagangan (R. Soekardono, 1963). Selanjutnya, Achmad Ichsan mendeskripsikan hukum dagang sebagai hukum yang khusus mengatur permasalahan perdagangan, terutama yang timbul dari perilaku individu di ranah perdagangan (Achmad Ichsan, 1987).

Dalam konteks bisnis modern, hukum dagang memainkan peranan penting dalam membangun relasi bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Ia mengatur berbagai aspek, termasuk kontrak, sanksi bagi pelanggaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin muncul selama transaksi. Dengan adanya hukum dagang, setiap pihak dapat menjalankan usahanya dengan kepercayaan dan rasa aman.

Contohnya, hukum dagang mengatur kontrak jual beli yang jelas, sehingga timbul kejelasan dalam hak dan tanggung jawab setiap pihak. Hal ini dapat mencegah konflik yang dapat merusak hubungan bisnis. Di samping itu, hukum dagang juga berperan dalam perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual.

Secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang hukum dagang sangat penting bagi pelaku usaha. Hal ini tidak hanya membantu mereka dalam menjalankan kegiatan bisnis, tetapi juga dalam menjaga relasi bisnis yang saling menguntungkan dan berkelanjutan di era globalisasi ini.

Dikutip dari buku Hukum Perdagangan Internasional yang ditulis Aprita dan Aditya serta penelitian oleh Supancana (2013), Jenis-jenis regulasi atau statuta dalam hukum dagang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu regulasi atau statuta nasional dan internasional. Regulasi atau statuta nasional adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur perdagangan di dalam negeri. Sedangkan regulasi atau statuta internasional adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh organisasi internasional atau negara-negara yang tergabung

dalam suatu perjanjian internasional untuk mengatur perdagangan antar negara.

Hukum dagang berfungsi sebagai landasan normatif dalam hubungan antara para pelaku bisnis. Dengan menetapkan aturan main yang jelas, hukum dagang melindungi hak-hak masing-masing pihak, serta menjaga keseimbangan dalam relasi bisnis. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir risiko yang dapat muncul akibat ketidakpastian dalam transaksi.

Selain itu, hukum dagang juga berperan dalam menciptakan kepastian hukum. Ketika semua pihak memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku, trust dalam relasi bisnis dapat terbangun. Ini membantu perusahaan dalam menjalankan operasionalnya secara efisien, sejalan dengan standar yang telah ditentukan.

Hukum dagang tidak hanya berfokus pada perlindungan hak-hak individu, tetapi juga mencakup aspek kebijakan industri. Regulasi yang tepat dapat memberikan dorongan bagi inovasi dan persaingan sehat, mendorong para pelaku bisnis untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan. Hal ini penting dalam menciptakan relasi bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

Dalam konteks praktik bisnis modern, hukum dagang juga mengatur berbagai aspek teknologi dan transaksi digital. Dengan kemajuan teknologi, penting bagi pelaku bisnis untuk memahami hukum yang relevan agar dapat melakukan transaksi secara aman dan legal. Keterpaduan ini mendukung terciptanya relasi bisnis yang lebih kokoh dan progresif.

Dalam konteks globalisasi dan ekspansi ekonomi yang dinamis, hukum dagang memainkan peranan krusial dalam menata kerangka bisnis di masyarakat. Beberapa fungsi kunci dari hukum dagang meliputi:

Mengendalikan perdagangan lintas batas sambil mempertahankan kepentingan nasional dalam arena perdagangan global (Rasyidi, 2018). Dalam rangka mengendalikan perdagangan lintas batas dan tetap menjaga kepentingan nasional di panggung perdagangan global, ada sejumlah langkah strategis yang dapat diambil. Salah satunya adalah dengan membangun pasar

tradisional di daerah perbatasan, yang dapat mendukung perdagangan lintas batas. Selain itu, penting pula untuk menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara guna memperluas akses pasar dan jangkauan perdagangan. Regulasi dan peraturan perdagangan internasional juga harus diperkuat, seperti yang telah diinisiasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) khususnya di sektor komoditas digital. Kebijakan perdagangan yang berfokus pada kepentingan nasional, seperti perlindungan produk domestik dan pengembangan industri nasional, juga harus terus ditingkatkan. Peningkatan kualitas dan efisiensi produksi produk domestik, serta penguatan branding, menjadi krusial untuk meningkatkan daya saing produk di kancah internasional. Tak kalah pentingnya, meningkatkan kerjasama bilateral atau multilateral dengan negara-negara lain, khususnya dalam hal infrastruktur dan teknologi, dapat memajukan posisi perdagangan suatu negara. Dengan mengadopsi pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan perdagangan lintas batas dapat dikelola dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan nasional di arena perdagangan global.

Melindungi hak-hak baik produsen maupun konsumen, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun lingkungan yang mendukung investasi (Tobing, 2015). Dalam upaya memajukan ekonomi, sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk produsen dan konsumen. Dengan melindungi hak-hak mereka, ini tidak hanya memastikan bahwa praktik bisnis berjalan adil dan etis, tetapi juga membantu membangun kepercayaan yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, upaya tersebut juga berfungsi sebagai fondasi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi. Sebuah lingkungan yang mendukung investasi akan menarik lebih banyak pelaku bisnis dan investor untuk berpartisipasi aktif, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi lebih lanjut pada pertumbuhan ekonomi.

Menyediakan jaminan perlindungan bagi konsumen dan memastikan integritas dalam setiap transaksi (Rasyidi, 2018). Dalam setiap transaksi, sangat esensial untuk menjamin perlindungan bagi konsumen dan memastikan integritas proses tersebut (Rasyidi, 2018). Hal ini penting agar konsumen merasa aman dan percaya dalam bertransaksi, serta memastikan bahwa setiap tindakan bisnis dilakukan dengan etika dan kejujuran.

Memastikan keamanan dalam mekanisme pasar, memberikan perlindungan khusus bagi UMKM, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan perbankan. Dalam menjaga stabilitas ekonomi, sangat penting untuk menjamin keamanan dalam mekanisme pasar. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering kali lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Selain itu, peningkatan efisiensi dalam sistem keuangan dan perbankan juga esensial untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Mengatur pelaksanaan berbagai aktivitas dalam sektor dagang, industri, dan keuangan. Dalam ekosistem ekonomi, penting untuk memiliki regulasi yang mengatur pelaksanaan aktivitas di sektor dagang, industri, dan keuangan. Hal ini memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan, meminimalkan risiko, dan memastikan bahwa praktik-praktik bisnis yang beretika dan adil diterapkan di seluruh sektor.

Menentukan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian bisnis. Dalam dunia bisnis, sangat penting untuk jelas menentukan hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian. Hal ini memastikan bahwa semua pihak memahami apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang mereka berhak terima. Dengan demikian, setiap pihak dapat memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik, mengurangi potensi konflik, dan menjaga hubungan bisnis yang harmonis.

Menjamin praktik bisnis yang seimbang dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam

dunia bisnis, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk merasa bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan seimbang. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, tetapi juga membangun kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata publik. Menjamin praktik bisnis yang adil memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan, baik itu karyawan, pelanggan, pemasok, atau pemegang saham, memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dan mendapatkan manfaat dari operasi bisnis. Dengan demikian, ini meningkatkan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang dari bisnis tersebut.

Penelitian ini menemukan bahwa hukum dagang memiliki peran yang signifikan dalam menjamin kelancaran transaksi komersial modern, terutama dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Namun, regulasi hukum dagang di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika bisnis global.

Salah satu temuan utama adalah kurangnya pengaturan yang spesifik terkait transaksi berbasis teknologi, seperti kontrak elektronik, sistem pembayaran digital, dan penggunaan teknologi *blockchain*. Hal ini menyebabkan potensi risiko hukum, seperti ketidakpastian atas keabsahan kontrak digital dan kurangnya mekanisme perlindungan konsumen dalam *e-commerce*.

Selain itu, perbandingan dengan regulasi di negara lain menunjukkan bahwa beberapa negara telah menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel dan progresif, seperti pengakuan resmi terhadap kontrak pintar (*smart contracts*) dan sistem pengawasan yang adaptif terhadap fintech. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperbarui kerangka hukum dagangnya.

Pembahasan juga menyoroti perlunya peningkatan literasi hukum di kalangan pelaku usaha agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban dalam transaksi modern. Selain itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku

usaha, dan lembaga hukum untuk menciptakan regulasi yang responsif terhadap perkembangan zaman tanpa mengurangi prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Dengan demikian, pembaruan hukum dagang menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung transaksi komersial modern yang dinamis dan berbasis teknologi. Hal ini akan memastikan bahwa hukum dagang tetap relevan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks hukum dagang, tantangan yang dihadapi perusahaan sering kali berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang terus berkembang. Perubahan dalam regulasi dapat mengakibatkan kebingungan dan memaksa pelaku bisnis untuk terus memperbarui pengetahuan hukum mereka agar tidak terjerat dalam masalah hukum.

Beberapa isu terkini dalam hukum dagang mencakup perlindungan hak kekayaan intelektual dan praktik perdagangan yang adil. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, pelanggaran hak kekayaan intelektual semakin marak terjadi, yang dapat merugikan innovator dan pengusaha.

Selain itu, ketidakpastian hukum di beberapa daerah dapat menghambat relasi bisnis dan kolaborasi antar perusahaan. Tantangan ini memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan pelaku bisnis untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Solusi potensial bisa berupa pembinaan dan edukasi hukum bagi pengusaha. Dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dagang, pelaku bisnis dapat lebih siap menghadapi tantangan dan menciptakan relasi bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam konteks hukum dagang, beberapa isu terkini yang menjadi perhatian utama mencakup perlindungan data, tuntutan transparansi, serta ketidakpastian hukum akibat perubahan regulasi. Isu-isu ini berpotensi mempengaruhi relasi bisnis antara perusahaan dan mitra bisnis.

Perlindungan data menjadi krusial dengan meningkatnya transaksi digital yang semakin

marak. Perusahaan harus memastikan bahwa data pelanggan dan mitra bisnis terlindungi secara efektif. Hal ini juga berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Tuntutan transparansi dari konsumen dan pemangku kepentingan mendorong perusahaan untuk lebih terbuka mengenai praktik bisnis mereka. Ketidakjelasan dalam kebijakan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan risiko reputasi bagi perusahaan.

Perubahan regulasi yang sering terjadi menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi keputusan bisnis. Pengusaha perlu beradaptasi dan memastikan bahwa mereka selalu mematuhi ketentuan yang berlaku. Kesiapan untuk merespons isu-isu ini merupakan bagian integral dalam membangun relasi bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan hukum dagang, pengembangan regulasi yang adaptif menjadi salah satu solusi potensial. Regulasi yang fleksibel dapat menjawab dinamika pasar yang cepat dan memungkinkan bisnis beroperasi sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Penerapan teknologi informasi juga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam relasi bisnis. Dengan adanya sistem manajemen yang berbasis digital, perusahaan dapat lebih mudah mematuhi peraturan hukum dagang dan mengurangi risiko pelanggaran hukum.

Selain itu, edukasi hukum bagi pelaku bisnis merupakan langkah penting untuk menciptakan kesadaran tentang hukum dagang. Pengetahuan yang cukup akan membantu pengusaha memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan.

Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam merumuskan kebijakan juga sangat diperlukan. Dengan adanya dialog yang konstruktif, solusi yang dihasilkan akan relevan dan mendukung terciptanya relasi bisnis yang lebih sehat.

Peranan hukum dagang dalam relasi bisnis modern sangat krusial untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Dengan adanya kepastian hukum,

pelaku bisnis dapat menjalankan aktivitas mereka tanpa rasa khawatir akan risiko hukum yang dapat mengganggu kelangsungan usaha.

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum dagang pun harus diatasi dengan pendekatan yang inovatif. Menghadapi isu-isu terkini, diperlukan kolaborasi antara pengusaha dan pemangku kebijakan untuk mengembangkan solusi yang efektif, sehingga relasi bisnis tetap terjaga dan berkembang.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan meskipun pernah menghadapi tantangan berat, seperti krisis ekonomi yang panjang. Kemajuan yang dicapai merupakan hasil kolaborasi berbagai elemen masyarakat melalui pembangunan yang holistik, dengan sektor ekonomi sebagai motor penggerak utama. Dalam konteks ini, bisnis memainkan peran sentral dalam memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus menjadi indikator kesuksesan ekonomi individu.

Hukum dagang berfungsi penting sebagai instrumen yang memastikan keadilan, kepastian hukum, dan kelancaran aktivitas bisnis. Perannya mencakup pengaturan perdagangan lintas batas, perlindungan hak produsen dan konsumen, penguatan sistem keuangan, dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa regulasi hukum dagang di Indonesia masih perlu disempurnakan, terutama dalam menghadapi tantangan modern seperti transaksi berbasis teknologi, kontrak elektronik, dan pembayaran digital.

Studi komparatif menunjukkan bahwa beberapa negara lain telah mengadopsi kebijakan yang lebih adaptif terhadap teknologi, seperti pengakuan smart contracts dan regulasi fintech. Hal ini menunjukkan pentingnya pembaruan regulasi hukum dagang di Indonesia agar dapat bersaing di tingkat global, memberikan perlindungan yang memadai, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat hukum diperlukan untuk menciptakan regulasi yang progresif dan relevan. Dengan demikian, hukum dagang dapat terus menjadi landasan kokoh dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam transaksi komersial modern, sekaligus mendorong kemajuan ekonomi nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- R. Soekardono. 1963. Hukum Dagang Indonesia Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rasyidi, M. A. 2018. Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*
- Supancana, I. G. A. 2013. "Peran Hukum Dagang dalam Era Globalisasi." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Indonesia*
- Suwignyo, T. 1996. Hukum Dagang (Aspek Hukum dalam Dunia Bisnis). Unika Atma Jaya, Jakarta.
- Tobing, J. S. 2015. "Pentingnya Regulasi dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi*
- BieNa Art, B. A. 2015. Hukum Dagang.
- Tobing, R. D. 2015. Aspek-aspek hukum bisnis: pengertian, asas, teori dan praktik.